



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 /DPRD.LPG/III.01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Dan Panitia Khusus Pembahasan Atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka pembantukan 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 143/F-PDI-P/DPRD/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :05/F-Gerindra/DPRD.LPG/II/2023, tanggal Februari 2023 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 08/FPG/DPRD/II/2023, tanggal 06 Februari 2023 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/F-PD/DPRD/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 03/F-NasDem/DPRD/II/2023, 8 Februari 2023 perihal Nama-nama Anggota F-Nasdem yang Duduk di Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/F-PKB/DPRD/30/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;

7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 211/FPKS/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 perihal Usulan Nama-nama Anggota DPRD Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 93/F-PAN/DPRD/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 perihal Nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 6 Februari 2023;
10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dan Panitia Khusus Pembahasan Atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 2 /DPRD.LPG/III.01/2023
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 - 2043

Ketua : JOKO SANTOSO,SP.,MH.
Wk. Ketua : KOSTIANA,SE.,MH.
Sekretaris : IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
Anggota : 1. NI KETUT DEWI NADI,ST.
2. SAHLAN SYUKUR,SE.
3. KETUT RAMEO
4. Drs. MUKLIS BASRI,M.Si.
5. MIRZALI SS, SH.,M.Kn.
6. DARLIAN PONE,SE.,SH.,MH.
7. Drs. H. AZWAR YOCUB
8. FERDI FERDIAN AZIS,SH.
9. Ir. MIDI ISWANTO,MH.
10. ANGGA SATRIA PRATAMA,S.I.Kom.MBA.
11. MARDIANA,ST.,MT.
12. NURIL ANWAR,S.Sos.
13. H. OKTA RIJAYA M,MM.
14. AZUWANSYAH, S.Ag.,MM.
15. H. ADE UTAMI IBNU,SE.
16. ZUNianto,M.Pd.I.
17. H. ABDULLAH SURA JAYA,SH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**



Hj.RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**



Hj.RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 2 /DPRD.LPG/III.01/2023
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
LAMPUNG TERHADAP KEPATUHAN ATAS BELANJA MODAL TAHUN
ANGGARAN 2022 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG

Ketua : BUDI YUHANDA,SH.,M.Kn.
Wk. Ketua : SONI SETIAWAN,ST.,MH.
Sekretaris : H. SYARIF HIDAYAT,ST.,MM.
Anggota : 1. H. WATONI NOERDIN,SH.,MH.
2. KETUT ERAWAN,SH.
3. NURUL IKHWAN
4. H. YANUAR IRAWAN,SH.,MH.
5. SUPRIYANTO,SP.,MM.
6. I MADE SUAR JAYA,SH.,MH.
7. Drs.H.MIKDAR ILYAS,MM.
8. H. SUPRIYADI HAMZAH,SH.
9. DARLIAN PONE,SE.,SH.,MH.
10. I GEDE JELANTIK,SE.
11. YOZI RIZAL,SH.
12. H. AMALUDIN,SH.
13. Hi.GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.Kom.,MM.
14. MAKSUM ASRORI
15. H. HENI SUSILO,S.Pd.
16. H. ABDULLAH SURAJAYA,SH.
17. AHMAD ISWAN H. CAYA,SH.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**



Hj.RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 2 /DPRD.LPG/III.01/2023
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BUMD
PT. LAMPUNG JASA UTAMA (LJU)

Ketua : H. NOVERISMAN SUBING,SH.,MM.
Wk. Ketua : H. MARDANI UMAR,SH.,MH.
Sekretaris : H. SUPRAPTO,S.Psi.,MH.
Anggota : 1. H. DADANG SUMPENA,S.Sos.,MM.
2. APRILLIATI,SH.,MH.
3. BUDHI CONDROWATI,SE.
4. Drs.YOSE RIZAL,MH.
5. RAHMAT MIRZANI DJAUSAL,ST.,MM.
6. AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.
7. IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
8. Hi. ISMET RONI,SH.,MH.
9. Drs. I MADE BAGIASA
10. Drs. FX SIMAN
11. HANIFAL,SP.
12. BUDIMAN AS
13. Hj. Dr. ASIH FATWANITA,MM.
14. WAHRUL FAUZI SILALAH,SH.
15. Dra.JAUHAROH S, MM.
16. H. ISMAIL JAFAR, Lc.
17. Drs. DARWIN HIFNI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**



Hj.RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 2 /DPRD.LPG/III.01/2023
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Ketua : VITTORIO DWISON,S.I.P.
Wk. Ketua : H. AHMAT FITONI
Sekretaris : Hj. NURHASANAH,SH.,MH.
Anggota : 1.LENISTAN NAINGGOLAN, SH.,MH.
2. LESTY PUTRI UTAMI, SH.,M.Kn.
3. FERLISKA RAMADITA JOHAN,SH.
4. MIRZALLI SS.,SH.,M.Kn.
5. FAHRORROJI,ST.
6. VERI AGUSLI HTB,SE.
7. Hi. ISMET RONI,SH.,MH.
8. Drs. I MADE BAGIASA
9. H. ALI IMRON,S.Fil.
10. DENI RIBOWO,SE.
11. MUHAMMAD KHADAFI AZWAR,SH.
12. Hi. IMAM SYUHADA
13. SITI RAHMA,SE.,MH.
14. MAULIDAH ZAUROH,MA.Pd.
15. HANIFAH,SE.
16. H.SEMIN,M.Pd.
17. H.YUSIRWAN,SE.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**



Hj.RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.